



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

L A P O R A N D E L E G A S I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MENGHADIRI THE VIRTUAL MEETING OF THE 42ND GENERAL ASSEMBLY
OF ASEAN INTER-PARLIAMENYARY (AIPA)

THEME: FORGING PARLIAMENTARY COOPERATION IN DIGITAL
INCLUSION TOWARDS ASEAN COMMUNITY 2025

Brunei Darussalam, 23 - 25 Agustus 2021

I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Partisipasi Delegasi DPR RI pada Virtual Meeting of the 42nd General Assembly of ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) pada tanggal 23 - 25 Agustus 2021 yang dilaksanakan oleh Brunei Darussalam selaku tuan rumah berdasarkan pada hasil keputusan Rapat Pimpinan BKSAP tanggal 10 Agustus 2021 dan Surat Tugas Nomor 14/D/ST/PD-DN/BKSAP-KSR/08/2021 tentang Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Sidang Umum ke-42 ASEAN *Inter-parliamentary Assembly*.

B. SUSUNAN DELEGASI

Adapun Susunan Delegasi DPR RI ke Virtual Meeting of the 42nd General Assembly of ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Dr (H.C.) Puan Maharani | Ketua Delegasi/ Ketua DPR RI |
| 2. Dr. Azis Syamsuddin | Wakil Ketua Delegasi/ Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan |
| 3. Dr. Fadli Zon | Ketua BKSAP/Anggota Delegasi/F-P Gerindra |
| 4. Sdr. Putu Supadma Rudana | Wakil Ketua BKSAP/Anggota Delegasi/F-PD |
| 5. Sdr. Achmad Hafisz Tohir | Wakil Ketua BKSAP/Anggota Delegasi/F-PAN |

6. Dr. Mardani Ali Sera, M. Eng	Wakil Ketua BKSAP/Anggota Delegasi/F-PKS
7. Sdri. Irine Yusiana Roba Putri	Anggota Delegasi/F-PDIP
8. Sdr. Ichsan Firdaus	Anggota Delegasi/F-PGolkar
9. Sdri. Himmatul Aliyah	Anggota Delegasi/F-PGerindra
10. Sdr. I Gusti Agung Rai Wirajaya	Anggota Delegasi/F-PD
11. Sdr. Muslim	Anggota Delegasi/F-PD
12. Sdri. Arzeti Bilbina	Anggota Delegasi/F-PKB
13. Sdr. Syahrul Aidi Maazat	Anggota Delegasi F-PKS
14. Sdr. Arkananta Akram	Anggota Delegasi/F-PNasdem

Tema Sidang Umum AIPA ke-42 kali ini yaitu “*Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025*”. Selama persidangan berlangsung, Delegasi DPR RI didampingi oleh Pejabat dan Staff Setjen DPR RI, Tenaga Ahli BKSAP, serta Pejabat dan Staff Kementerian Luar Negeri RI.

C. VISI DELEGASI

Visi Delegasi DPR RI mengikuti Sidang Umum AIPA ke-42 yaitu:

- 1) Berpartisipasi aktif dalam Sidang Umum AIPA ke-42 sebagai anggota dari organisasi antar parlemen ASEAN (AIPA), berdasar pada prinsip-prinsip universal untuk perdamaian kawasan, kemerdekaan, demokrasi dan hak asasi manusia;
- 2) Melakukan peran diplomasi parlemen dalam rangka memperkuat kebijakan politik luar negeri RI untuk mewujudkan kepentingan nasional. Indonesia sebagai salah satu inisiator pembentukan ASEAN dan AIPA memiliki komitmen terhadap perwujudan visi Masyarakat ASEAN 2025. DPR RI sebagai perwakilan rakyat Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelibatan Indonesia dalam berbagai kerangka kerja sama regional maupun internasional sejalan dengan kepentingan masyarakat Indonesia.

D. MISI DELEGASI

Adapun misi Delegasi DPR RI mengikuti Sidang Umum AIPA ke-42, antara lain adalah:

- 1) Menjalin persahabatan dan mempererat kerja sama bilateral dengan negara-negara anggota AIPA dan organisasi-organisasi yang menjadi mitra wicara AIPA;
- 2) Memperdalam pemahaman mengenai kebijakan, pengalaman dan praktik terbaik negara-negara di Asia Tenggara terkait isu-isu yang menjadi tantangan bersama;

- 3) Memberikan kontribusi terhadap upaya menciptakan kawasan ASEAN yang damai, stabil, dan lebih sejahtera;
- 4) Mendorong AIPA agar menghasilkan resolusi-resolusi yang implementatif dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan regional.

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Serangkaian kegiatan dilakukan dalam rangka persiapan partisipasi Delegasi DPR RI pada Konferensi Video Sidang Umum AIPA yang ke-42, baik dalam hal teknis maupun substansi. Guna kelancaran tugas Delegasi dari segi teknis, Sekretariat BKSAP telah mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung bagi keikutsertaan Delegasi dalam konferensi video sidang. Sementara dari segi substansi, Sekretariat bersama Tenaga Ahli telah menyusun rancangan-rancangan resolusi dan posisi delegasi, dengan mempertimbangkan masukan yang komprehensif dari Kementerian Luar Negeri RI.

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA SIDANG

Sidang Umum ke-42 AIPA yang mengambil tema “*Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025*” ini pada awalnya mengajukan sejumlah agenda dan rancangan resolusi yang akan dibahas dan disepakati secara konsensus melalui Sidang Komite Eksekutif. Adapun agenda yang akan dibahas pada Sidang Umum AIPA ke-42 yang telah disepakati oleh Komite Eksekutif adalah sebagai berikut:

Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)

1. *Promoting Women’s Economic Empowerment in the Future of Work and Post Pandemic Recovery through Digital and Financial Inclusion (Proposed by Brunei Darussalam).*

Committee on Political Matters

1. *Report of the 12th AIPA Caucus*
2. *Enhancing Cybersecurity and Data Protection towards a Resilient Cyberspace in ASEAN (Proposed by Brunei Darussalam)*
3. *Fostering Human Security to Achieve Digital Inclusion in ASEAN (Proposed by Malaysia)*
4. *Promoting Parliamentary Diplomacy to Move the ASEAN Community Forward (Proposed by Thailand)*
5. *Parliamentary Support on the Situation in Myanmar (Proposed by Indonesia)*

Committee on Economic Matters

1. *Promoting Inclusive Digital ASEAN to Empower MSMEs and Strengthen the ASEAN Economic Integration (Proposed by Brunei Darussalam and Malaysia)*
2. *Post-COVID-19 Economic Recovery: Tourism Cooperation in ASEAN (Proposed by Thailand).*

Committee on Social Matters

1. *Report of the 4th AIPACODD Meeting and Resolution on Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges towards Drug-Free ASEAN (Proposed by Brunei Darussalam).*
2. *Strengthening Cooperation and Enhancing Digital Inclusion to Mitigate Climate Change Impacts (Proposed by Brunei Darussalam).*
3. *Technology to Facilitate Greater Election Participation (Proposed by Malaysia).*
4. *Localising the Sustainable Development Goals for Effective National Implementation (Proposed by Malaysia).*

Committee on Organizational Matters

1. *Financial Report 2020-2021*
2. *Draft Resolution on Granting Permission to Use Special Funds for the Payment of Cost-Sharing of the New Premises of AIPA Secretariat and for the Minor Adjustment in the Salary of the Locally Recruited Staff of the AIPA Secretariat*
3. *Budget Estimation 2021-2022*
4. *Secretariat's Annual Report 2020-2021*
5. *Accrediting the Observer Applications*
6. *Amendment to the AIPA Status*
7. *Guiding Rules and Procedures for the Hosting of the AIPA General Assembly*
8. *Guidelines and Procedures of the AIPA-ASEAN Dialogue*
9. *Rules & Procedures of the Meeting of the Young Parliamentarians of AIPA*
10. *Establishment of the AIPA-EP Dialogue*
11. *AIPA Distinguished Service Award*
12. *Appreciation of the President of AIPA*
13. *Date and Venue of the 43rd AIPA General Assembly*

B. SITUASI UMUM PERSIDANGAN

Sidang Umum ke-42 ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) yang telah berlangsung secara daring dari Brunei Darussalam sebagai tuan rumah pada

tanggal 23-25 Agustus 2021 dengan tema: “*Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025*” dipimpin oleh Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam, **H.E. Pehin Dato Abdul Rahman Taib** selaku Presiden AIPA dan dihadiri secara virtual oleh delegasi dari seluruh Parlemen Anggota AIPA kecuali Myanmar, 10 Parlemen Pengamat, Tamu Penyelenggara, Sekretariat AIPA dan ASEAN, serta Mitra AIPA.

Executive Committee Meeting (Excom)

Komite Eksekutif dilaksanakan melalui korespondensi *e-mail*. Presiden Komite Eksekutif, Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib mengirimkan surat kepada para Anggota Komite Eksekutif AIPA pada tanggal 3 Agustus 2021 untuk mempersiapkan program, agenda dan hal-hal terkait lainnya yang berkaitan dengan Sidang Umum untuk mendapatkan input/masukan.

Setelah berkonsultasi dengan seluruh anggota Komite Eksekutif dan mendapatkan persetujuan, maka pada 17 Agustus 2021, Presiden Komite Eksekutif dan juga Presiden AIPA ke-42, menginformasikan beberapa hal yaitu:

- Komite Eksekutif menerima penyampaian *emergency item* mengenai *Draft Resolution on Parliamentary Support on the Situation in Myanmar* yang diusulkan oleh Indonesia
- Mengadopsi Program Kegiatan dan Draf Agenda Sidang Umum ke-42 yang telah disesuaikan dengan diterimanya usulan *emergency item* dari Indonesia dan akan dibahas pada *Committee on Political Matters*
- Menominasikan Presiden *National Assembly of Cambodia* selaku Presiden AIPA berikutnya sebagai *Vice-Chairperson Executive Committee Meeting*
- Mengadopsi komposisi komisi, nominasi untuk AIPA *Distinguished Service Award*, serta penerimaan Pengamat/*Observer* baru
- Sepakat untuk menyelenggarakan Sidang Umum AIPA ke-43 di Kamboja sebagai tuan rumah, dengan kursi kepresidenan AIPA berikutnya yang dipegang oleh *The National Assembly of Cambodia*

Opening Ceremony

Upacara Pembukaan Sidang Umum ke-42 AIPA dilaksanakan pada hari Senin, 23 Agustus 2021, dimulai pukul 09.00 WIB. **H.E. Pehin Dato Abdul Rahman Taib**, Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam selaku Presiden AIPA menyampaikan pidato pembukaannya. Pada pidato pembukaannya, **H.E. Pehin Dato Abdul Rahman Taib** menyambut hangat seluruh Parlemen Anggota AIPA, *observer*, tamu dan mitra kerja yang dengan semangat persahabatan serta kerjasama tinggi berkenan menghadiri Sidang Umum ke-42 AIPA secara virtual, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Sesuai dengan tema Sidang Umum ke-42 AIPA, “*Forging Parliamentary Cooperation in*

Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025”, **H.E. Pehin Dato Abdul Rahman Taib** menghimbau agar transformasi digital yang inklusif dapat menjadi prioritas untuk membangun ketahanan dan persiapan yang lebih baik bagi generasi saat ini dan di masa mendatang dalam menghadapi era pasca pandemi. Dijelaskan pula, bahwa tema yang diangkat tahun ini tidak hanya bertujuan menyambut, mempromosikan dan menjadikan inklusi digital sebagai sebuah cara untuk memperkuat kerjasama parlemen yang lebih jauh di tengah pandemi, melainkan menyoroti pula peran penting parlemen dalam mendukung visi ASEAN 2025 untuk membentuk komunitas ASEAN yang kohesif secara politik, terintegrasi secara ekonomi dan bertanggungjawab secara sosial. Sejumlah isu lain seperti pemberdayaan perempuan, perubahan iklim, keamanan siber, dan penguatan integrasi ekonomi juga masuk dalam agenda Sidang Umum AIPA tahun ini. Oleh karenanya, penting bagi anggota parlemen AIPA untuk memastikan keselerasan dengan dasar niat kolektif, bersatu dalam tekad dan tujuan yang sama.

Acara berikutnya dilanjutkan dengan penyampaian pidato kenegaraan oleh **H.M. Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin**, sebagai Tamu Kehormatan (*Guest of Honour*), Sultan sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Brunei Darussalam yang dibacakan melalui rekaman video. Dalam pesan videonya, **H.M. Sultan Hassanal Bolkiah**, menyambut para delegasi ke Sidang Umum ke-42 AIPA yang diadakan secara virtual dan menyoroti tema kepemimpinan ASEAN 2021 yang dipegang Brunei Darussalam, yaitu “*We care, We Prepare, We Prosper*” yang merefleksikan upaya kontinyu ASEAN merespon dengan cepat dalam memperhatikan masyarakatnya di tengah situasi yang tidak menentu. Melalui tema yang diusung Sidang Umum kali ini, **H.M. Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin** menegaskan komitmen Parlemen Anggota AIPA dalam membangun ASEAN sebagai masyarakat digital dan blok ekonomi yang terdepan, melalui harmonisasi peraturan, serta standarisasi hukum dan kebijakan di seluruh wilayah ASEAN. **H.M. Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin** juga menekankan kegigihan Parlemen dalam menjadikan AIPA kunci organisasi dan platform yang meningkatkan kerjasama multilateral dalam rangka mewujudkan keinginan kolektif ASEAN yaitu melihat generasi sekarang dan masa depan untuk dapat terus menikmati perdamaian, keamanan, kemakmuran, dan pertumbuhan ekonomi.

H.M. Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin juga menyampaikan keyakinannya bahwa diskusi dalam Sidang Umum ke-42 AIPA akan mengembangkan cara-cara baru mengenai bagaimana AIPA dan ASEAN dapat bekerja bersama untuk merespon secara efektif berbagai tantangan global dan regional. **H.M. Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin** juga menyerukan kepada seluruh anggota parlemen ASEAN untuk melanjutkan kerjasama dengan para *observer* AIPA.

First Plenary Session

Sidang Pleno Pertama pada Sidang Umum ke-42 AIPA dilaksanakan pada hari Senin, 23 Agustus 2021 pukul 10.30 WIB. Sidang pleno tersebut dipimpin oleh **H.E. Pehin Dato Abdul Rahman Taib**, Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam selaku Presiden AIPA, yang diawali dengan pembukaan Sidang dan undangan kepada masing-masing delegasi untuk memperkenalkan diri.

Pada sidang pleno pertama ini, turut didiskusikan dan diputuskan agenda persidangan. Selain itu, masing-masing Ketua Delegasi menyampaikan sambutannya pada sesi paripurna pertama ini.

Meeting of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)

Sidang *Woman Parliamentarians of AIPA* dilaksanakan secara virtual pada tanggal 23 Agustus 2021 mulai pukul 16.00 hingga 18.00 WIB. Sidang dipimpin oleh **Hon. Ms. Siti Rozaimeriyanty Dato Seri Lela Jasa Haji Abdul Rahman** selaku Ketua Sidang yang juga merupakan Anggota Dewan Legislatif Brunei Darussalam, didampingi Wakil Presiden dari tuan rumah Sidang Umum AIPA berikutnya, yaitu Kamboja.

Dengan semangat kerjasama, persatuan dan persaudaraan ASEAN, para delegasi berdiskusi untuk memastikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan pasca pandemi. Hal tersebut sejalan pula dengan mandat AIPA untuk mendukung tujuan ASEAN *Community 2025* dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang bercita-cita menuju komunitas inklusif dan mencapai kesetaraan gender serta memastikan tidak ada yang tertinggal.

Sidang membahas dan mengadopsi resolusi tentang Mempromosikan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam Lingkup Kerja di Masa Mendatang dan Pemulihan Pasca Pandemi melalui Inklusi Finansial dan Digital; *Resolution on Promoting Women's Economic Empowerment in the Future of Work and Post Pandemic Recovery Through Digital and Finacial Inclusion*.

Resolusi memuat pengakuan terhadap ketimpangan gender yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang kohesif secara politik, terintegrasi secara ekonomi dan bertanggungjawab secara sosial.

Diskusi fokus membahas akses digital dan inklusi finansial bagi perempuan, melampaui isu kesetaraan gender, yang merupakan bagian esensial dan berhubungan dengan pembangunan politik, sosial dan ekonomi negara. Oleh karenanya, Komite menekankan perlunya membangun sebuah kerangka kerja

dan serangkaian rekomendasi kebijakan untuk menutup *gap gender digital* tersebut, dan mempersiapkan perempuan dalam area kerja di masa mendatang dan pemulihan pasca pandemi, serta meningkatkan sistem hukum nasional dan kerjasama regional untuk memastikan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inklusi finansial dan digital di era pasca pandemi.

Selain akses terhadap sumberdaya finansial untuk memastikan inklusi finansial, Komite juga menyepakati bahwa perempuan harus mendapatkan jaminan dengan mekanisme perlindungan sosial yang cukup untuk menjaga stabilitas dan keamanan finansial dengan pengembangan layanan finansial digital.

Sidang Komisi Politik

Sidang Komisi Politik dilaksanakan pada 24 Agustus 2021 pukul 08:30 WIB hingga 11:30 WIB dipimpin oleh **Hon. Ms. Nik Hafimi Abdul Haadii**, Anggota Dewan Legislatif Brunei Darussalam, sebagai Ketua Sidang didampingi Wakil Presiden dari negara tuan rumah Sidang Umum berikutnya, Kamboja.

Sebelum diskusi dimulai, Ketua Sidang mengingatkan prinsip konsensus dalam mekanisme pembuatan keputusan yang mendasari pelaksanaan sidang. Dengan perspektif tersebut, Ketua Sidang menekankan bahwa ketidaksetujuan dalam satu agenda pembahasan sepatutnya tidak akan mengganggu agenda pembahasan lainnya.

Komisi Politik membahas beragam isu yang terkait dengan 5 (lima) rancangan Resolusi. Resolusi pertama mengenai “*Adoption of the Report of the 12th AIPA Caucus held via Video Conference hosted by the Parliament of Singapore*” yang diterima dan disetujui untuk diadopsi. Resolusi kedua tentang “*Enhancing Cybersecurity and Data Protection Towards a Resilient Cyberspace in ASEAN*” yang mengakui adanya pertumbuhan perdagangan elektronik yang secara signifikan berkontribusi pada ekonomi global, namun secara paralel juga membawa ancaman pada keamanan siber dan perlindungan data. Komisi mengakui pentingnya keamanan siber untuk memaksimalkan keuntungan digitalisasi bagi pengembangan politik dan sosio-ekonomi. Dalam hal ini, Komisi sepakat bahwa Parlemen Anggota AIPA memainkan peran penting dalam memastikan keamanan siber dan perlindungan data di kawasan, melalui regulasi, kebijakan dan peraturan dari negara-negara anggota ASEAN.

Komisi juga berbagi pandangan yang memperkuat kapabilitas masing-masing *Computer Emergency Response Teams* (CERTs) dan agen penegakkan hukum keamanan siber nasional, sebagaimana mendorong implementasi aktivitas bersama kawasan untuk mempererat kerjasama dan kolaborasi dalam bidang keamanan siber dan perlindungan data, dalam rangka memastikan

implementasi yang praktis dan efektif dari 11 prinsip sukarela-norma yang tidak mengikat perilaku negara dalam dunia siber.

Resolusi ketiga tentang “*Fostering Human Security to Achieve Digital Inclusion in ASEAN*”. Komisi berbagi pandangan bahwa inklusi digital merupakan salah satu dari pilar utama pemulihan COVID-19 dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dan keamanan manusia merupakan sebuah pendekatan yang penting dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan beragam tantangan yang luas serta lintas sektor untuk bertahan hidup, mempertahankan mata pencaharian dan martabat masyarakat di kawasan.

Komisi membahas dan mengeksplorasi peran AIPA dalam menyelesaikan isu tersebut. Komisi sepakat bahwa Anggota Parlemen AIPA harus memaksimalkan pemanfaatan AIPA sebagai platform dalam mempromosikan isu keamanan manusia untuk mencapai inklusi digital melalui dialog yang sarat makna dan pertukaran pengalaman. Lebih jauh, parlemen Anggota AIPA harus memperkuat diplomasi parlemen untuk mendukung dan melengkapi upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah di masing-masing negaranya. Komisi oleh karenanya, menyampaikan permintaan kepada Sekretariat AIPA untuk melihat potensi kerjasama dengan *United Nations Trust Fund for Human Security* (UNTFHS) dan mengeksplorasi area kerjasama yang potensial.

Resolusi keempat mengenai “*Promoting Parliamentary Diplomacy to Move the ASEAN Community Forward*”. Sesuai dengan maksud dan tujuan AIPA sebagaimana ditetapkan dalam Statuta yaitu untuk menggerakkan ASEAN menuju pencapaian sasaran ASEAN dengan menawarkan kontribusi parlemen terhadap integrasi ASEAN, Komisi sepakat bahwa sebagai perwakilan masyarakat ASEAN, parlemen Anggota AIPA harus berperan menjadi penghubung yang kuat bagi komunitas ASEAN yang berfokus pada masyarakatnya, melalui diplomasi parlemen.

Komisi menekankan bahwa diplomasi parlemen dapat lebih berperan dalam menyelesaikan dampak multidimensi akibat pandemi melalui diantaranya, pertukaran pandangan. Komisi juga mengingatkan perlunya melengkapi upaya neagara-negara anggota ASEAN dalam percepatan integrasi dan pembangunan komunitas kawasan melalui diplomasi parlemen.

Komisi sepakat untuk memperkuat diplomasi parlemen melalui semua level kegiatan AIPA untuk memajukan komunitas ASEAN. Komisi juga sepakat untuk memperkuat diplomasi parlemen antara AIPA dan organisasi internasional lainnya seperti IPU, APPF dan mitra parlemen penting lainnya. Dan lebih jauh, Komisi mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk secara aktif bergabung dalam kegiatan AIPA, untuk mempromosikan sinergi antara AIPA dan ASEAN.

Dan resolusi yang kelima tentang “*Parliamentary Support on the Situation in Myanmar*” yang diusulkan oleh Indonesia untuk menyerukan perdamaian, stabilitas dan demokrasi kembali kepada Myanmar. Seluruh parlemen anggota AIPA dalam Komisi bertukar pandangan mengenai draft resolusi ini secara berurutan. Masing-masing menyampaikan perhatiannya yang mendalam terhadap situasi di Myanmar dan meminta upaya dari semua pihak untuk mencari solusi damai atas nama kepentingan masyarakat Myanmar. Seluruh delegasi juga menyampaikan dukungan penuh mereka untuk pelaksanaan menyeluruh dan segera terkait Lima Poin Konsensus Myanmar dan menyambut baik penunjukkan Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk memfasilitasi dialog yang inklusif dan konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan terhadap solusi damai. Komisi juga menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui AHA centre.

Sidang Komisi Ekonomi

Sidang Komisi Ekonomi dilaksanakan secara virtual pada 24 Agustus 2021 pukul 12:45 WIB sampai 14:15 WIB. Sidang dipimpin oleh **Ms. Siti Rozaimeryanty Dato Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman**, Anggota Dewan Legislatif Brunei Darussalam sebagai Ketua Sidang didampingi Wakil Ketua dari negara tuan rumah Sidang berikutnya yaitu Kamboja. Sidang Komisi Ekonomi dilaksanakan dengan semangat kerjasama, persatuan dan persahabatan tradisional ASEAN. Sidang membahas 2 (dua) resolusi.

Resolusi pertama tentang “*Promoting Inclusive Digital ASEAN to Empower MSMEs and Strengthen the ASEAN Economic Integration*”. Resolusi ini dibahas sehubungan dengan adanya kesadaran terhadap dampak COVID-19 yang telah berpengaruh terhadap ekonomi, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pentingnya integrasi ekonomi sebagai agenda utama Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagaimana inklusi digital di ASEAN. Komisi menegaskan peran penting yang dimainkan teknologi digital dalam memperkuat konektivitas ekonomi serta kesiapan ASEAN dalam merespon berbagai tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Komisi juga menekankan pentingnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian ASEAN yang beragam dan dinamis. Komisi membahas lebih jauh terkait pengembangan kapabilitas dan jaringan UMKM, termasuk peningkatan dan pelatihan ulang keahlian digital UMKM.

Sidang Komisi Ekonomi memutuskan untuk memajukan kebijakan dan legislasi melalui harmonisasi integrasi digital ekonomi ASEAN, yang memprioritaskan konektivitas, terutama konektivitas area terpencil dan sub-kawasan, integrasi kawasan dan mempersempit jurang pembangunan antara negara anggota ASEAN dalam berkoordinasi menangkap berbagai peluang transisi menuju Revolusi Industri Ke-empat dalam pengintegrasian berbagai sektor kunci

menuju integrasi ekonomi ASEAN. Lebih jauh, Komisi mendorong transformasi dan ekonomi digital sebagai sebuah jalan ke depan untuk mengupayakan penyediaan kesempatan yang lebih baik bagi UMKM, dan untuk mengatasi dampak gangguan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Resolusi kedua tentang “*Post COVID-19 Economic Recovery: Tourism Cooperation in ASEAN*”. Resolusi ini menekankan tentang kerusakan yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 terhadap sektor turisme di dunia, khususnya ASEAN, dimana ekonomi sangat bergantung pada sektor tersebut. Komisi menekankan bahwa sektor pariwisata akan memainkan peran penting dalam memberikan solusi berkelanjutan untuk kawasan ASEAN pasca pandemi COVID-19 dengan memperkuat kerjasama di antara masing-masing Negara Anggota.

Sepanjang diskusi dan pembahasan resolusi, Komisi Ekonomi menegaskan kembali komitmen AIPA untuk mendukung secara penuh Rencana Strategis Turisme ASEAN 2016-2025 dengan memprioritaskan kembali kegiatan dan proyek yang ditujukan untuk merevitalisasi turisme di kawasan, setelah mengatasi pandemi COVID-19. Melalui resolusi tersebut, Komisi turut mendukung visi Turisme ASEAN 2025 dimana ASEAN bertujuan untuk menjadi destinasi turis yang aman dan berkualitas yang menawarkan beragam pengalaman yang unik sebagai kekhasan ASEAN dan berkomitmen untuk mengembangkan turisme yang bertanggungjawab, berkelanjutan, inklusif dan berimbang, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat ASEAN, terutama selama era pasca pandemi.

Komisi Ekonomi mendorong para anggota Parlemen AIPA untuk mendukung dan memfasilitasi pendekatan yang terkoordinasi dan terintegrasi melalui pergerakan masyarakat yang esensial di kawasan ASEAN. Lebih jauh, Komisi menyerukan Parlemen Anggota AIPA dan negara anggota ASEAN untuk membentuk kerjasama regional melalui pertukaran pengalaman, kebijakan dan pembangunan kapasitas.

Sidang Komisi Sosial

Sidang Komisi Sosial dilaksanakan pada 24 Agustus 2021 pada pukul 15:30 WIB hingga 17:30 WIB. Sidang dipimpin oleh **Hon. Ms. Khairunnisa Haji Ash'ari**, Anggota Dewan Legislatif Brunei Darussalam dan didampingi oleh Wakil dari Parlemen negara tuan rumah sidang umum AIPA berikutnya, Kamboja.

Dalam semangat kerjasama, solidaritas dan persahabatan, Sidang Komisi Sosial membahas dan mengadopsi 3 (tiga) rancangan resolusi untuk disahkan pada Sidang Paripurna yaitu;

- *Resolution on the Adoption of the Report of the 4th Meeting of the AIPA Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) and the Resolution on Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges towards Drug-Free ASEAN.*
- *Resolution on Strengthening Cooperation and Enhancing Digital Inclusion to Mitigate the Impacts of Climate Change.*
- *Resolution on Localising the Sustainable Development Goals for Effective National Implementation.*
- *Resolution on Technology to Facilitate Greater Election Participation*

Sidang Komisi Organisasi

Sidang Komisi Organisasi dilaksanakan pada 25 Agustus 2021 pukul 09:00 WIB hingga 11:00 WIB. Sidang dipimpin oleh **Hon. Mr. Haji Abdul Hamid Sabli Haji Arshad**, Anggota Dewan Legislatif Brunei Darussalam dan didampingi oleh Wakil dari Parlemen negara tuan rumah sidang umum AIPA berikutnya, Kamboja. Sidang Komisi Organisasi dilaksanakan dengan semangat kerjasama, persatuan dan persahabatan tradisional ASEAN, dan berhasil membahas serta mengadopsi 15 Rancangan Resolusi sebagai berikut:

1. *Resolution on the Financial Report 2020-2021.*
2. *Resolution on Granting Permission to Use Special Funds for the Payment of Cost-Sharing of New Premises of AIPA Secretariat and for the Minor Adjustment in the Salary of the Locally Recruited Staff of the AIPA Secretariat.*
3. *Resolution on Budget Estimation 2021-2022.*
4. *Resolution on Secretariat's Annual Report 2020-2021.*
5. *Resolution on Accrediting the Parliament of Ukraine as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).*
6. *Resolution on Accrediting the Parliament of Pakistan as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).*
7. *Resolution on Amendment to the AIPA Statutes.*
8. *Resolution on Guiding Rules and Procedures for the Hosting of the AIPA General Assembly.*
9. *Resolution on Guidelines and Procedures of the AIPA-ASEAN Hearing.*
10. *Resolution on Rules and Procedures of the Meeting of the Young Parliamentarians of AIPA.*
11. *Resolution on Establishment of the AIPA-EP Dialogue.*
12. *Resolution on AIPA Distinguished Service Award to HE. Post. Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap (Cambodia)*
13. *Resolution on AIPA Distinguished Service Award to Hon. Dr. Fadli Zon (Indonesia).*

14. *Resolution on Appreciation of the President of AIPA.*
15. *Resolution on Date and Venue of the 43rd AIPA General Assembly.*

Sambutan dari AIPA Observer Countries

Sebagaimana sidang Umum AIPA sebelumnya, sesi dialog dengan negara-negara *Observer* AIPA disesuaikan menjadi pembacaan sambutan dari masing-masing negara *Observer*. Tiap-tiap negara *Observer* diberikan kesempatan untuk membacakan sambutan pada sesi *First Plenary Session* dengan alokasi waktu tidak melebihi 3 menit.

Second Plenary Session

Seluruh rangkaian persidangan umum yang ke-42 AIPA berakhir pada Sidang Pleno kedua yang diadakan pada 25 Agustus 2021 pukul 13:30 WIB hingga 16:15 WIB. Pada sidang ini, dilaporkan hasil dari masing-masing Komisi dan Sidang *Women Parliamentarian*, untuk kemudian disetujui oleh delegasi yang hadir dan dituangkan pada dokumen *output* yaitu, *Joint Communique*. Sidang juga sekaligus mengesahkan sejumlah Resolusi yang rancangannya telah dibahas terlebih dahulu pada Sidang Komisi dan Sidang *Women Parliamentarian*.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan *Joint Communique* oleh para Ketua/Wakil Delegasi AIPA sebagai salah satu pencapaian Sidang Umum ke-42 AIPA dan penganugerahan AIPA *Distinguished Service Award* yang diberikan kepada Delegasi Indonesia, **Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc.** dan Delegasi Kamboja Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap. Selanjutnya dilaksanakan juga serah terima kepemimpinan AIPA kepada **H.E. Samdech Akka Ponhea Chakrei Heng Samrin** dari Kamboja yang akan menjabat Presiden AIPA selama setahun kedepan dan akan menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-43 AIPA pada tahun 2022. Sidang Umum ke-42 AIPA kemudian secara resmi ditutup melalui Sidang Pleno Kedua oleh Presiden AIPA ke-42 sekaligus Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam, **H.E. Pehin Dato Abdul Rahman Taib**.

Pada Sidang Pleno kedua ini, Delegasi DPR RI diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan **Dr. Azis Syamsuddin** sekaligus membacakan sambutan penutupan.

C. PARTISIPASI DELEGASI DPR RI

Delegasi DPR RI telah berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian persidangan. Berikut uraian partisipasi aktif Delegasi DPR RI pada Sidang Umum ke-42 AIPA:

First Plenary Session

Sidang Pleno Pertama dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 dipimpin oleh Presiden ke-42 AIPA sekaligus Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam, **H.E. Pehin Dato Abdul Rahman Taib**. Dalam sidang tersebut, masing-masing ketua delegasi menyampaikan *statement*. Delegasi DPR RI diwakili oleh Ketua Delegasi yang juga merupakan Ketua DPR RI, **Dr (H.C.) Puan Maharani** didampingi **Sdri. Irine Yusiana Roba Putri** Anggota BKSAP dari Fraksi PDIP.

Ketua Delegasi DPR RI, **Dr (H.C.) Puan Maharani** menyampaikan dalam sambutannya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Legislatif Brunei Darussalam yang telah menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-42 AIPA di tengah suasana pandemi COVID-19. Dalam pernyataannya, beliau menekankan bahwa tantangan pandemi yang semakin meningkat dengan terus berkembangnya varian virus corona tidak dapat dihadapi sendirian oleh satu negara. Oleh karenanya, kerjasama internasional sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai tantangan global.

Ketua Delegasi DPR RI juga menyampaikan usulan sejumlah kerjasama yang dapat dilakukan di antara negara anggota ASEAN untuk mengatasi pandemi, yaitu kerjasama pertukaran informasi untuk mengatasi penyebaran virus dan kerjasama pemenuhan pasokan vaksin, alat kesehatan dan obat, serta penelitian.

Dr (H.C.) Puan Maharani percaya bahwa negara anggota ASEAN dapat lebih antisipatif dan memperkuat resiliensi serta kesiapan (*preparedness*) dalam menghadapi pandemi di masa mendatang, dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Beliau juga menekankan bahwa pandemi ini menjadi momentum bagi negara anggota ASEAN untuk dapat melakukan pembangunan secara lebih inklusif dan ramah lingkungan, paska pandemi.

Berkenaan dengan tema Sidang Umum tahun ini, Ketua Delegasi DPR RI menyampaikan bahwa tema tersebut merefleksikan hasrat parlemen untuk bekerjasama dalam membantu meningkatkan konektivitas digital di antara negara-negara anggota ASEAN. Beliau juga menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 saat ini telah berkontribusi bagi akselerasi pemanfaatan teknologi digital yang telah berdampak terhadap banyak area.

Dr (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN harus melanjutkan peningkatan kerjasama dan pertukaran informasi dalam rangka mendapatkan manfaat yang lebih besar dari teknologi digital. *Pertama*, kerjasama dalam meningkatkan ketersediaan dan akses internet yang terjangkau bagi masyarakat. Hal ini termasuk upaya peningkatan akses internet, terutama di daerah pedesaan dan area terpencil. *Kedua*, kerjasama untuk

meningkatkan sumber daya manusia yang terkait dengan keahlian dan literasi, tidak hanya mengambil manfaat dari teknologi digital semata, namun juga mencegah hoax dan disinformasi. *Ketiga*, kerjasama dalam perumusan kebijakan yang mendukung konektivitas digital dan juga untuk memastikan keamanan aktivitas digital, seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan perlindungan konsumen. *Keempat*, kerjasama untuk meningkatkan inovasi, edukasi, dan penelitian dalam teknologi digital. Sejalan dengan upaya dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi, penting untuk memperhatikan inklusi digital melalui perluasan akses internet yang merata.

Meeting of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)

Pada Sidang WAIPA, DPR RI diwakili oleh **Sdri. Himmatul Aliyah** dari Fraksi Partai Gerindra dan **Sdri. Arzeti Bilbina** dari Fraksi PKB. Pada kesempatan ini, Delegasi DPR RI menjelaskan bahwa perempuan menjadi pihak yang sangat terdampak dengan adanya pergeseran dramatis berupa transisi ke aktivitas daring untuk semua aspek kegiatan selama masa pandemi, dari mulai hilangnya pekerjaan, hingga kurangnya akses terhadap perlindungan sosial. Transisi digital tersebut telah menimbulkan keprihatinan terhadap kesenjangan digital gender yang semakin dalam di ASEAN. Disampaikan pula oleh **Himmatul Aliyah**, bahwa berdasarkan laporan *International Telecommunication Union (ITU)* Tahun 2019, secara global hanya 48% perempuan yang menggunakan internet dibandingkan pria yang mencapai angka 58%, mewakili ketimpangan gender sebesar 17%. Sedangkan menurut jajak pendapat eksekutif *World Economic Forum* Tahun 2020, semua negara ASEAN dipandang masih sangat jauh dalam pencapaian kesetaraan gender di peranan teknologi.

Di samping itu, inklusi finansial masih menjadi salah satu isu yang menantang di ASEAN, dimana hal tersebut berkaitan dengan pembangunan ekonomi negara-negara. Dikarenakan pandemi Covid-19, banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di ASEAN terdampak berat, di mana faktanya, mereka mewakili antara 97%-99% usaha dan antara 60%-80% total pekerja di seluruh kawasan.

Himmatul Aliyah menekankan bahwa menjadi kewajiban anggota parlemen untuk memperkuat upaya melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam memastikan akses terhadap layanan finansial dan digital, literasi finansial dan digital, sebagaimana kesempatan ketenagakerjaan dan kewirausahaan bagi perempuan dalam merespon kondisi pekerjaan yang berubah-ubah.

Sidang Komisi Politik

Pada sidang Komisi Politik, DPR RI diwakili oleh Ketua BKSAP **Dr. Fadli Zon**, dari Fraksi Partai Gerindra, didampingi Anggota BKSAP **Sdr. Ichsan Firdaus** dari Fraksi Partai Golkar dan **Sdr. Muslim** dari Fraksi Partai Demokrat.

Delegasi DPR RI mengajukan satu rancangan resolusi yang berjudul *Resolution on Parliamentary Support on the Situation in Myanmar*, yang menekankan pada upaya pencarian solusi atas situasi konflik di Myanmar dan memastikan stabilitas serta keamanan, baik di Myanmar maupun di kawasan.

Dr. Fadli Zon menegaskan bahwa rancangan resolusi mengenai dukungan parlemen terhadap situasi di Myanmar sangat mendesak untuk dibahas dan diadopsi mengingat konflik yang belum terselesaikan hingga saat ini di Myanmar. Melalui rancangan resolusi yang diusulkan oleh parlemen Indonesia tersebut, **Dr. Fadli Zon** berharap AIPA dapat menunjukkan itikad baik kepada dunia internasional, yang mencerminkan dukungan terhadap kemajuan kecil yang telah dibuat ASEAN melalui penunjukkan **H.E. Erywan Yusof** sebagai utusan khusus ASEAN, terkait upaya pencarian solusi damai di Myanmar.

Sidang Komisi Sosial

Delegasi DPR RI pada Sidang Komisi Sosial diwakili oleh **Sdr. Putu Supadma Rudana** dari Fraksi Partai Demokrat dan **Sdr. Arkananta Akram** dari Fraksi Partai Nasdem. Delegasi DPR RI mengajukan masukan amandemen terhadap 3 (tiga) rancangan resolusi yang dibahas pada Sidang Komisi Sosial.

Terkait rancangan resolusi mengenai penguatan kerjasama dan peningkatan inklusi digital untuk mengurangi dampak perubahan iklim, **Arkananta Akram** berpandangan bahwa rancangan resolusi tersebut cukup relevan dengan kondisi dunia saat ini. **Arkananta Akram** menjelaskan bahwa digitalisasi dan perubahan iklim merupakan dua isu yang berbeda namun saling terkait. Adopsi digital dalam berbagai sektor telah menjadi agenda global yang mencirikan revolusi industri 4.0.

Menurutnya, memanfaatkan kecenderungan digitalisasi tersebut untuk mengendalikan perubahan iklim merupakan sebuah terobosan yang relatif baru sekaligus cerdas. **Arkananta Akram** menekankan bahwa perubahan iklim merupakan isu global yang sangat mendesak saat ini, dimana tidak ada negara yang mampu menghadapinya sendirian. Seluruh negara berjuang dalam memenuhi target *Paris Agreement* dimana kapasitas, teknologi dan kemampuan finansial masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Dalam hal ini, maka kerjasama regional dan adopsi teknologi menjadi hal yang sangat penting.

Sidang Komisi Ekonomi

Delegasi DPR RI pada Sidang Komisi Ekonomi diwakili oleh **Sdr. Ahmad Hafisz Tohir** dan **Sdr. I Gusti Agung Rai Wirajaya**. Pada Sidang Komisi Ekonomi, DPR RI mengajukan masukan amandemen terhadap 2 (dua) rancangan resolusi yang dibahas pada Sidang Komisi Ekonomi.

Terkait rancangan resolusi pertama, **Ahmad Hafisz Tohir** menekankan bahwa ekonomi digital berlanjut menjadi mesin pertumbuhan yang kuat selama pandemi dan kecenderungannya diharapkan berlanjut hingga setelah pandemi.

Ahmad Hafisz Tohir menjelaskan bahwa telah diproyeksikan integrasi digital ASEAN memiliki potensi untuk menghasilkan peningkatan 1 Triliun US\$ dalam PDB regional pada tahun 2025. Oleh karenanya, akselerasi integrasi digital menjadi hal utama. Bukan hanya untuk bertahan di era pasca pandemi, melainkan juga untuk membangun komunitas ekonomi yang memiliki ketahanan dan kuat dengan efisiensi yang meningkat, produktifitas yang lebih tinggi dan konektivitas rantai nilai yang lebih baik.

Sedangkan terkait Rancangan Resolusi kedua mengenai isu turisme, **I Gusti Agung Rai Wirajaya** menekankan bahwa isu turisme menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dari pandemi. Menurutnya, Pandemi telah memberikan dampak yang menghancurkan di tempat-tempat yang memiliki ketergantungan ekonomi besar pada pariwisata. Pada Sidang Umum AIPA tahun sebelumnya, Indonesia telah mengusulkan isu yang serupa meskipun kemudian usulan tersebut digabungkan, mengingat masing-masing Komisi dapat memutuskan hanya 1 (satu) resolusi.

Delegasi Indonesia menyampaikan kembali dukungan yang kuat terhadap kedua rancangan resolusi tersebut dengan mengajukan sejumlah amandemen untuk memperkaya rancangan resolusi dimaksud.

Sidang Komisi Organisasi

Pada Sidang Komisi Organisasi Delegasi DPR RI diwakili oleh Wakil Ketua BKSAP, **Dr. Mardani Ali Sera**. Pada sidang Komisi Organisasi ini, DPR RI mengajukan usulan terhadap amandemen Statuta AIPA, yaitu terkait mekanisme pengambilan keputusan dalam Sidang Umum. Indonesia mengajukan usulan terhadap *Article 9 (7.a)* Statuta AIPA yaitu dihapusnya kalimat "*only matters on which consensus cannot be attained shall be dropped*". Selain itu, Indonesia juga mengusulkan digabungnya kalimat dalam *Article 9 (7.a)* dengan *Article 9 (7.b)* menjadi 1 paragraf yang berbunyi "*Decisions by the General Assembly on any subject shall be made by consensus. When consensus cannot be achieved, the General Asembly may decide on how a specific decision can be made*".

Melalui usulan ini, Delegasi Indonesia berpandangan bahwa perlu untuk menyediakan kemungkinan alternatif mekanisme pengambilan keputusan lainnya ketika tidak tercapai konsensus. Hal ini menurut DPR RI dapat memperkuat AIPA untuk menjadi wadah yang lebih aspirasional dan antisipatif dalam menghadapi dinamika perkembangan regional dan global yang kompleks. Usulan Indonesia ini disetujui dan diterima oleh forum.

III. HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Sidang Umum ke-42 AIPA dengan tema “*Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion towards ASEAN Community 2025*” yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 Agustus 2021 secara daring dengan Brunei Darussalam sebagai tuan rumah ini menghasilkan dokumen *Report of the 42nd General Assembly of AIPA, Joint Communique* dan 26 (dua puluh enam) resolusi di Komisi WAIPA, Komisi Ekonomi, Komisi Sosial dan Komisi Organisasi. Berikut adalah uraian resolusi yang dihasilkan tersebut:

1. *Resolution on Promoting Women’s Economic Empowerment in the Future of Work and Post Pandemic Recovery through Digital and Financial Inclusion*

Resolusi ini menekankan pada pentingnya inklusi finansial dan akses digital untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama untuk pemulihan paska pandemi dan dunia kerja bagi perempuan di masa mendatang.

Resolusi ini menyerukan penguatan strategi digital inklusif untuk menyelesaikan kesenjangan gender digital sembari mengelola keamanan digital dan keamanan siber. Resolusi ini juga menyerukan untuk membangun jaringan dan kerjasama di semua tingkatan dalam mengembangkan kapasitas perempuan, memastikan bahwa pekerjaan disediakan untuk perempuan, dan melakukan penelitian terkait dampak COVID-19 pada tenaga kerja wanita ASEAN untuk memetakan rencana pascapandemi. Resolusi ini juga mendorong untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas peningkatan keterampilan yang responsif dan efektif bagi wanita dan perempuan-perempuan muda.

2. *Resolution on the Adoption of The Report of the 12th AIPA Caucus*

Resolusi ini berisi tentang laporan hasil pelaksanaan Sidang ke-12 AIPA Caucus.

3. *Resolution on Enhancing Cybersecurity and Data Protection Towards a Resilient Cyberspace in ASEAN*

Resolusi ini menekankan tentang kesadaran atas semakin meningkatnya ancaman terhadap keamanan siber dan perlindungan data seiring dengan perkembangan perdagangan elektronik. Resolusi ini mendukung peningkatan keamanan siber dan perlindungan data di ASEAN melalui hukum, kebijakan dan regulasi parlemen anggota AIPA untuk

memaksimalkan manfaat digitalisasi bagi perkembangan politik dan sosial ekonomi di kawasan.

4. *Resolution on Fostering Human Security to Achieve Digital Inclusion in ASEAN*

Menjelaskan mengenai pentingnya inklusi digital sebagai kunci pemulihan COVID-19 dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Resolusi ini juga menegaskan tentang pentingnya pendekatan keamanan manusia dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai tantangan di kawasan.

5. *Resolution on Promoting Parliamentary Diplomacy to Move the ASEAN Community Forward*

Menjelaskan tentang pentingnya penguatan diplomasi parlemen melalui semua level kegiatan AIPA untuk memajukan komunitas ASEAN dan perlunya meningkatkan diplomasi parlemen antara AIPA dengan komunitas internasional lain salah satunya melalui sinergi antara AIPA dengan ASEAN.

6. *Resolution on Promoting Inclusive Digital ASEAN to Empower MSMEs and Strengthen the ASEAN Economic Integration*

Menjelaskan mengenai pentingnya teknologi digital dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) dalam memperkuat konektivitas dan akitifitas ekonomi ASEAN. Resolusi ini mendorong pengembangan jaringan dan kapabilitas UMKM melalui harmonisasi kebijakan dan legislasi menuju integrasi digital ekonomi ASEAN.

7. *Resolution on the Post Covid-19 Economic Recovery: Tourism Cooperation in ASEAN*

Menekankan mengenai pentingnya revitalisasi sektor turisme di kawasan pasca pemulihan pandemi Covid-19 untuk mewujudkan ASEAN sebagai tujuan wisata yang aman, berkualitas, unik dengan kekhasan ASEAN, bertanggung jawab, inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi *ASEAN Tourism 2025*.

8. *Resolution on the Adoption of the Report of the 4th Meeting of the AIPA Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) and the Resolution on Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges towards Drug-Free ASEAN*

Menekankan mengenai seruan kepada Parlemen Anggota AIPA untuk menegaskan kembali sikap dan pendekatan toleransi nol, pengenalan langkah-langkah efektif, penguatan kebijakan yang telah ada, peningkatan kerjasama lintas batas dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait penegakan hukum atas pemakaian dan peredaran obat-obatan terlarang menuju masyarakat ASEAN bebas narkoba.

9. *Resolution on Strengthening Cooperation and Enhancing Digital Inclusion to Mitigate the Impacts of Climate Change*

Menegaskan pentingnya kerjasama regional dan peranan teknologi digital dalam memajukan aksi iklim untuk mengurangi resiko dampak perubahan iklim di kawasan.

10. *Resolution on Localising the Sustainable Development Goals for Effective National Implementation*

Menegaskan tentang pentingnya peran aktif anggota parlemen dalam memastikan hukum dan kebijakan yang dapat berkontribusi bagi pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tahun 2030.

Selain resolusi di bidang WAIPA, Politik, Ekonomi dan Sosial, Sidang Umum ke-42 AIPA juga mengesahkan 16 (enam belas) resolusi terkait organisasi AIPA, yakni:

1. *Resolution on the Financial Report 2020-2021.*
2. *Resolution on Granting Permission to Use Special Funds for the Payment of Cost-Sharing of the New Premises of AIPA Secretariat and for the Minor Adjustment in the Salary of the Locally Recruited Staff of the AIPA Secretariat*
3. *Resolution on the Budget Estimation 2021-2022.*
4. *Resolution on Secretariat's Annual Report 2020-2021.*
5. *Resolution on Accrediting the Parliament Ukraine as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).*
6. *Resolution on Accrediting the Parliament of Pakistan as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).*
7. *Resolution on Accrediting the Parliament of Georgia as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).*
8. *Resolution on the Amendments of the AIPA Statutes.*
9. *Resolution on Guiding Rules and Procedures for the Hosting of the AIPA General Assembly.*
10. *Resolution on Guidelines and Procedures of the AIPA-ASEAN Hearing.*
11. *Resolution on Rules and Procedures of the Meeting of the Young Parliamentarians of AIPA.*

12. *Resolution on Establishment of the AIPA-EP Dialogue.*
13. *Resolution on Distinguished Service Award to His Excellency Post. Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap (Cambodia).*
14. *Resolution on Distinguished Service Award to Hon. Dr. Fadli Zon (Indonesia).*
15. *Resolution on Appreciation of the President of AIPA.*
16. *Resolution on Date and Venue of the 43rd AIPA General Assembly.*

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a) Sidang Umum ke-42 AIPA yang berlangsung dari tanggal 23 – 25 Agustus 2021 merupakan sidang umum kedua yang dilaksanakan secara daring. Sidang yang diselenggarakan dengan Brunei Darussalam sebagai tuan rumah ini berlangsung secara lancar. Sidang telah berhasil mengesahkan 26 (dua puluh enam) resolusi di Komisi WAIPA, Komisi Ekonomi, Komisi Sosial dan Komisi Organisasi
- b) Meskipun Rancangan Resolusi usulan DPR RI di Komisi Politik mengenai dukungan parlemen terhadap penyelesaian konflik di Myanmar tidak berhasil mendapatkan dukungan dari Parlemen Anggota AIPA, namun demikian Misi Delegasi DPR RI relatif telah tercapai antara lain melalui peran aktif selama rangkaian acara SIUM dan diterimanya usulan Resolusi Indonesia di Komisi Ekonomi, Sosial, WAIPA, Komisi Organisasi, serta melalui usulan-usulan perubahan paragraf pada tiap-tiap Resolusi yang dibahas
- c) Partisipasi Delegasi DPR RI dalam SIUM AIPA ke-42 merupakan wujud nyata komitmen DPR RI dalam mendukung terbentuknya Masyarakat ASEAN yang inklusif, yaitu dengan menyuarakan kepentingan masyarakat Indonesia di forum regional/internasional

B. SARAN

- a) Hasil Sidang Umum ke-42 AIPA berupa resolusi-resolusi di bidang WAIPA, Ekonomi, Sosial dan Organisasi memerlukan tindak lanjut implementasi dari masing-masing parlemen dan pemerintah negara-negara anggota AIPA. Oleh karena itu, resolusi yang telah disepakati dalam SIUM AIPA 42 sebaiknya segera didistribusikan ke Komisi-Komisi yang terkait di DPR RI untuk disampaikan ke Departemen/Institusi/Kementerian terkait untuk ditindaklanjuti

- b) Berkaca dari pengalaman keikutsertaan Delegasi DPR RI pada SIUM 38, 39, 40 dan 41, khususnya terkait dengan tidak tercapainya konsensus atas Rancangan Resolusi usulan Delegasi DPR RI di Komisi Politik, maka dapat dipertimbangkan untuk terlebih dulu melakukan pendekatan diplomatis (*soft diplomacy*) melalui komunikasi intensif dengan Kedutaan Besar negara-negara ASEAN di Jakarta guna mensosialisasikan Rancangan Resolusi yang akan diusulkan oleh DPR RI terutama terkait dengan isu-isu sensitif. Dengan demikian, Kedutaan Besar negara-negara ASEAN di Jakarta diharapkan dapat mengkomunikasikan Rancangan Resolusi DPR RI kepada Parlemen masing-masing negara.
- c) Dalam hal penyusunan Rancangan Resolusi, perlu kiranya untuk mempertimbangkan Rancangan Resolusi alternatif dari Rancangan Resolusi utama yang diusulkan oleh DPR RI, terutama apabila Rancangan Resolusi berkaitan dengan isu-isu yang dianggap sensitif di ASEAN. Dengan harapan, apabila pada pelaksanaan SIUM Rancangan Resolusi utama mengalami resistensi, maka dapat diajukan Rancangan Resolusi alternatif yang secara substansi sama dengan Rancangan Resolusi Utama, namun dari sisi bahasa, diharapkan dapat lebih diterima oleh Parlemen negara-negara ASEAN.

V. PENUTUP

A. ANGGARAN

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan 11 (sebelas) Anggota DPR RI, 3 (tiga) orang Pejabat dan Staf Sekretariat Jenderal DPR RI (Sekretaris Delegasi), 1 (satu) orang Tenaga Ahli, 1 (satu) orang Penerjemah, 1 (satu) orang wartawan dari TV Parlemen serta 1 (satu) orang jurnalis media nasional adalah sebesar Rp. 1.034.813.500,-

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran hasil-hasil persidangan sebagai berikut:

- *List of Participants*
- *Report of the Executive Committee Meeting*
- *Report of the 42nd AIPA General Assembly*
- *Report of Committee on Political, Economic, Social, WAIPA and Organizational Matters*
- *Joint Communiqué*
- *Resolutions*
- *Written Message* Presiden RI (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris)
- *Statement of Head of AIPA Member Delegation – Dr (HC) Puan Maharani*
- *Dokumentasi foto*
- *Klipping berita*

C. KATA PENUTUP

Demikianlah Laporan Delegasi DPR RI menghadiri Konferensi Video Sidang Umum ke-42 AIPA tanggal 23 - 25 Agustus 2021 di Kamboja. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Agustus 2021

a.n Delegasi,

Ketua BKSAP DPR RI



Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc

A. 086